

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN  
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA  
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PERPAJAKAN BPKH  
Nomor: B. 23003/BPKH/BP/A6.4/01/2025**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan dan Pelaporan Perpajakan BPKH.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

1. Mengumpulkan data pajak untuk SPT Masa dengan merujuk pada data pajak Form Persetujuan Pencairan Anggaran (FPPA) setiap bulannya;
2. Melakukan validasi dari setiap transaksi pajak FPPA yang meliputi kesesuaian tarif pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran dan hal lainnya yang perlu penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan penyusunan kertas kerja SPT Masa berdasarkan rekapitulasi seluruh transaksi FPPA sesuai periode Pajak;
4. Melakukan penginputan dan reviu SPT Masa Normal dan termasuk SPT Masa Pembetulan pada aplikasi DJP Online sesuai periode masa pajak;
5. Melakukan pelaporan SPT Masa dan menyampaikan bukti pelaporan kepada BPKH dengan melampirkan Bukti Penerimaan Elektronik Unifikasi, SPT Induk e-Bupot Unifikasi, dan Bukti Potong Pajak per nomor FPPA;
6. Membuat kertas kerja sementara perhitungan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Th.2024 dan menyampaikan laporan perhitungan pajak penghasilan Badan;
7. Melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2024, diantaranya sesuai dengan angka laporan keuangan audited, yang telah mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya pemisahan penghasilan yang dikenai PPh final/tidak final dan pemisahan penghasilan objek pajak/bukan objek pajak;
8. Melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan dan menyampaikan bukti pelaporan kepada BPKH dengan melampirkan Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Induk;
9. Melakukan fungsi narasumber konsultansi perpajakan sesuai dengan kebutuhan transaksi BPKH yang terjadi pada tahun 2025;
10. Memberikan laporan hasil konsultansi perpajakan selama periode Tahun 2025.

- Kebutuhan Ahli/Personil                      Tenaga :    Penyedia terpilih wajib menyediakan
1. 1 (satu) orang tenaga ahli sebagai ketua tim dengan kualifikasi:
    - a. memiliki minimal 3 (tiga) kali pengalaman dalam penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh/SPT Tahunan PPh Badan dan melakukan rekonsiliasi fiskal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Periode tahun 2019 s.d 2025), dibuktikan dengan Surat Tugas/Kontrak/SPK/Bukti Serah Terima Pekerjaan (BAST)/Bukti yang relevan lainnya;
    - b. Memiliki sertifikasi lanjutan di bidang perpajakan yaitu Brevet C; dan
    - c. Pendidikan minimal strata dua (S2).
  2. 1 (satu) orang anggota tim dengan kualifikasi:
    - a. minimal 2 (dua) kali pengalaman dalam penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh/SPT Tahunan PPh Badan dan melakukan rekonsiliasi fiskal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Periode tahun 2022 s.d 2025), dibuktikan dengan Surat Tugas/Kontrak/SPK/Bukti Serah Terima Pekerjaan (BAST)/Bukti yang relevan lainnya;
    - b. Memiliki sertifikasi dasar dan menengah dibidang perpajakan yaitu Brevet A/B; dan
    - c. Pendidikan minimal strata satu (S1)
- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain)                      :    ▪ Terbatas hanya untuk Badan Usaha dengan bidang usaha Aktivitas Konsultasi Pajak dengan kode KBLI 69202
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                      :    Maksimal 308 (tiga ratus delapan) hari kalender
- Keluaran (*Output*)                      :    1 (satu) Paket dengan 14 (empat belas) Keluaran (*Output*) berupa:
  - a. 12 (dua belas) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2, masa pajak Januari s.d. Desember 2025 termasuk pembetulanannya selama tahun 2025;
  - b. 1 (satu) SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024 termasuk pembetulanannya, dan;
  - c. 1 (satu) Laporan Hasil Konsultansi Perpajakan BPKH.
- Perkiraan Maksimal Biaya                      :    Rp213.297.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com/) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com/) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui login ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan.

Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Kamis – Jumat, 23 – 31 Jan 2025	Kamis, 09.30 WIB	Kamis, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal <a href="http://vendor.pengadaan.com/">pengadaan.com</a>			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Kamis – Jumat, 23 – 31 Jan 2025	Kamis, 09.30 WIB	Jumat, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Rabu 3 – 5 Februari 2025	Senin, 10.00 WIB	Rabu, 12.00 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis – Jumat, 6 – 7 Februari 2025	Kamis, 10.00 WIB	Jumat, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Senin, 10 Februari 2025	08.00 WIB	17.00 WIB

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

**Keterangan:**

\*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Januari 2025

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

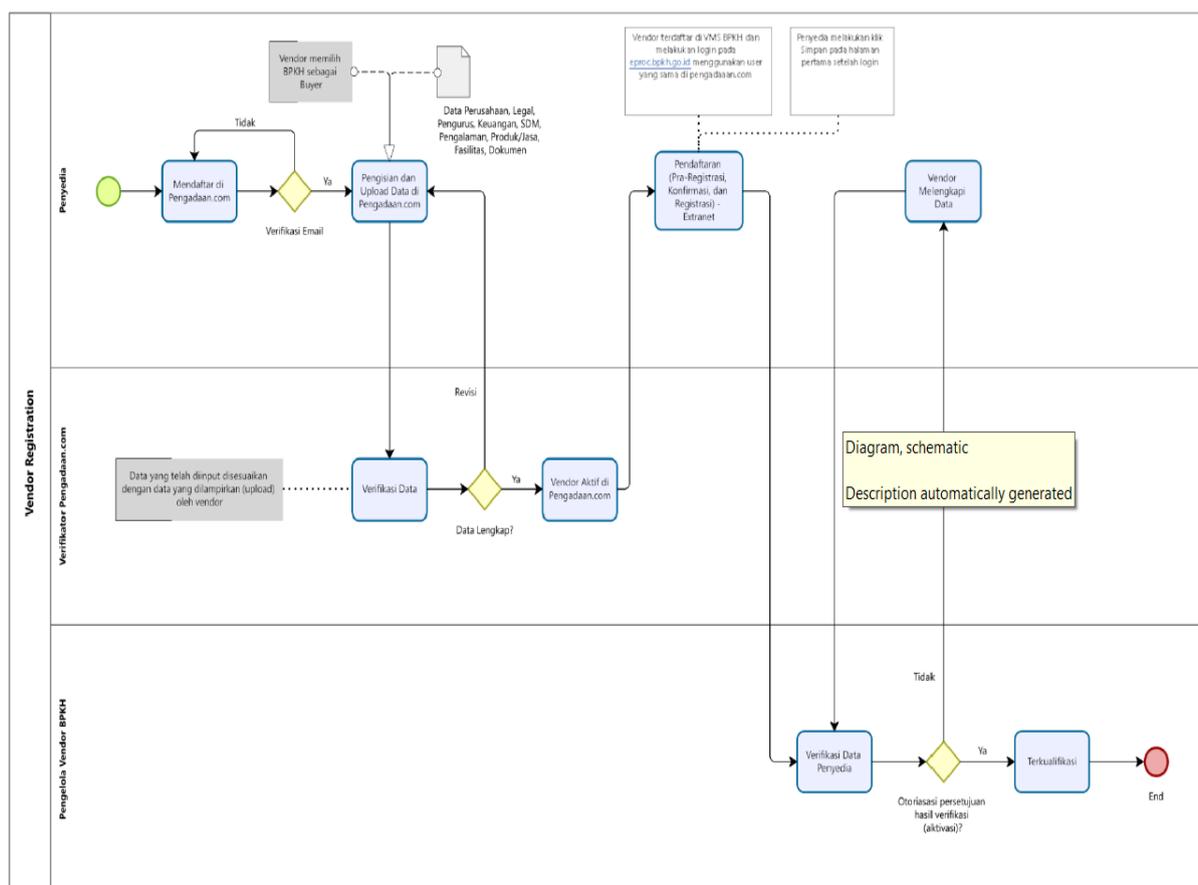
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 23003/BPKH/BP/A6.4/01/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

**Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:**



### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register						V	
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

#### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.